Ciptakan Ekosistem Digital Kalurahan, Bank BPD DIY Luncurkan Aplikasi Digdaya

KR -Istimewa

Peluncuran Aplikasi Digdaya secara simbolis oleh Sultan HB X didampingi Santoso Rohmad, Ibrahim dan Beby Suharsono

KR -Istimewa

Foto bersama usai penandatanganan Komitmen Pembaruan Roadmap TP2DD se-DIY

SLEMAN (KR) - Bank BPD DIY aktif melakukan transformasi digital untuk mempermudah transaksi keuangan bagi para nasabah. Salah satunya, Bank BPD DIY fokus pada digitalisasi di kalurahan dengan meluncurkan aplikasi Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta (Digdaya) Bank BPD DIY yang telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Pemerintah Desa (Siskeudes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendukung pengelolaan keuangan kalurahan secara digital dan transparan.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan peluncuran aplikasi Digitalisasi Dana Desa Yogyakarta (Digdaya) ini telah terintegrasi dengan Sistem Keuangan Pemerintah Desa (Siskeudes). Nama Desa dipilih bukan Kalurahan karena nomenklatur proses pengajuan izin aplikasi tersebut sudah dirintis sejak lama, termasuk persetujuan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

" Alhamdulillah, Bank BPD DIY berhasil meluncurkan aplikasi Digdaya ini. Aplikasi Digdaya merupakan salah satu infrastruktur untuk digitalisasi pemerintah daerah termasuk pemerintah kalurahan yang terkoneksi langsung dengan pemerintah daerah serta kementerian. Kehadiran aplikasi ini dalam rangka meningkatkan adanya transformasi digital maupun dalam hal kalurahan. Sebab kalurahan mempunyai kewenangan dan pengaturan dalam keuangannya lebih mandiri. Oleh karena itu, Bank BPD DIY bekerjasama dengan Bank Indonesia memfasilitasi menciptakan sebuah sistem digitalisasi yang diharapkan tercipta ekosistem digital di kalurahan termasuk reformasi kalurahan," ujar Santoso usai

High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY 2025 di Karaton Ballroom Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (16/04).

Santoso mengatakan penggunaan sistem digitalisasi menjadi salah satu indikator penting dalam reformasi kalurahan. Selain itu, mewujudkan transparansi akuntabilitas sistem keuangan daerah termasuk

KR -Istimewa

Suasana HLM TP2DD se-DIY 2025

" Dengan terciptanya ekosistem di kalurahan tersebut maka daya ungkit bagi perekonomiannya lebih cepat. Jika mitra di desa atau Kalurahan itu ada rapat maka ada belanja snack dan sebagainya sehingga akan termonitor bank. Dengan demikian bank bisa mengintervensi tentang permodalan dan sebagainya. Harapan kita daya ungkit perekonomian desa lebih kuat. Termasuk pemasaran atau marketingnya bisa melalui market hub yang kita kerjasamakan dengan Si Bakul dan sebagainya,' ungkapnya.

Aplikasi Digdaya ini, kata Santoso sudah diimplementasikan dan terhubung dengan seluruh kalurahan yang ada di seluruh kabupaten di DIY. Pemda DIY sendiri sudah memfasilitasi akses internet hingga level kalurahan, sedangkan Bank BPD DIY memfasilitasi dengan sistem pengelolaan keuangan *Cash Management System* (CMS) sehingga bisa melakukan transaksi keuangan secara mandiri. Dengan demikian nasabah tidak perlu datang ke bank sehingga lebih akuntabel dan efisien.

" Aplikasi Digdaya diakses oleh orang yang mengurusi keuangan seperti danarta di pemerintahan kalurahan tersebut. Kita sudah melakukan literasi artinya mereka dibekali penggunaan aplikasi Digdaya dan dipantau terus menerus. Manfaatkan antara lain perkembangan daerah lebih cepat karena pengelolaan keuangan lebih mudah dan transparan. Apabila sistem pengelolaan keuangan daerah sudah bagus maka akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi," terang Santoso.

KR -Istimewa

Sultan HB X memberikan arahan dalam HLM TP2DD se-DIY 2025.

Dalam arahannya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik peluncuran aplikasi Digdaya yang dikembangkan Bank BPD DIY sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan keuangan kalurahan secara digital. Dengan terintegrasinya aplikasi Digdaya dan Siskeudes Kemendagri serta telah digunakannya aplikasi ini di 305 kalurahan di wilayah Gunungkidul, Bantul, dan Sleman telah mencatat transaksi lebih dari Rp15,23 miliar sepanjang 2024.

" Ini merupakan langkah nyata dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi juga menyentuh sampai ke tingkat kalurahan. Saya berharap seluruh unsur TP2DD di DIY terus memperkuat kolaborasi, menjaga konsistensi dan membuka ruang-ruang inovasi baru demi terwujudnya ekosistem keuangan daerah yang inklusif, efisien, dan modern," tutur Sultan HB X.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim menyampaikan kebijakan sistem pembayaran BI pada tiga bidang utama di daerah, yakni digitalisasi penyaluran bantuan sosial, digitalisasi transportasi, serta digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kebijakan sistem pembayaran tersebut bertujuan mendorong inklusi ekonomi dan keuangan digital.

' Kami pun berkomitmen mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan dan optimalisasi ekosistem sistem pembayaran, antara lain melalui QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Termasuk mendukung fasilitasi aplikasi Digdaya yang terintegrasi dengan Siskeudes Kemendagri yang dikembangkan Bank BPD DIY," jelas Ibrahim.

Dalam kesempatan tersebut, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri, Basuki Sriono menyampaikan tujuan pengembangan Siskeudes Kemendagri sebagai media monitoring dan database pemerintahan desa untuk proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemda DIY karena seluruh desa atau kalurahan di DIY telah terhubung dengan implementasi Siskeudes secara online. **(Ira)**

SERUAN KETUA DPR PUAN MAHARANI

Jangan Lelah Perangi Kekerasan Seksual

JAKARTA (KR) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua elemen bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak lelah dalam memerangi kekerasan seksual di Indonesia. Hal itu disampaikan Puan menyusul banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam kuartal pertama 2025, termasuk yang baru saja terungkap yakni dugaan pelecehan dokter kandungan di Garut Jabar.

"Setiap hari kita mendengar, membaca berita atau informasi dan mungkin bahkan mengetahui langsung soal kasus kekerasan seksual yang memilukan dan mengiris hati. Kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terus menggunung ini menjadi PR kita bersama," ucap Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangannya, Rabu (16/4).

Belum selesai publik mengecam kasus kekerasan seksual yang dilakukan peserta program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di RS Dr Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, masyarakat kembali dibuat geram dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dokter spesialis kandungan berinisial MSF di Garut.

Kekerasan seksual yang diduga dilakukan Dokter MSF ini terungkap usai video yang memperlihatkan detik-detik saat MSF melakukan kekerasan seksual tersebar di media sosial. MSF diduga melakukan kekerasan seksual saat melakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) kepada korbannya.

Dalam kasus ini, sudah ada dua orang korban yang melapor dan pelaku telah ditangkap polisi. Menurut penelusuran, peristiwa yang viral di media sosial itu terjadi pada tahun 2024.

Puan meminta aparat penegak hukum bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bertindak cepat, transparan dan tegas dalam menangani kasus tersebut agar tidak mencederai kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.

Puan menekankan, ruang periksa dokter, khususnya dokter kandungan, harus menjadi tempat yang aman dan terlindungi, terutama bagi perempuan. Ia meminta agar Kemenkes mengevaluasi mekanisme pengawasan praktik dokter serta sistem perlindungan pasien di seluruh Indonesia.

"Kasus ini adalah alarm keras bagi sistem pengawasan tenaga kesehatan. Pemerintah harus menjamin, setiap warga negara, terutama perempuan, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang aman, bermartabat dan bebas dari pelecehan," tegas Puan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, dalam keterangan persnya juga mengecam pelecehan seksual terhadap pasien yang diduga dilakukan dokter kandungan di sebuah klinik di Garut. Peristiwa tersebut mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis dan pelayanan kesehatan.

(Ati/Ant)-f

KASUS INVESTASI BODONG EDCCASH

Polisi-Jaksa Dilaporkan ke KPK

JAKARTA (KR) - Korban dan terdakwa investasi bodong EDCCash melaporkan polisi dan jaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan dilakukan karena barang bukti yang disita dilaporkan hilang atau berkurang.

"Kenapa itu bisa terbuka? Karena sudah ada perdamaian antara korban dan para terdakwa," ujar pengacara terdakwa, Dohar Jani Simbolon di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (16/4).

Dohar menyebutkan salah satu barang yang hilang tersebut seperti tas seharga Rp 1 miliar. Selain itu, sembilan sertifikat hak milik sempat digadai senilai Rp 7,5 miliar. "Itu tadi dasar kenapa kami melaporkan aparat penegak hukum ini, karena mereka tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan di KUHAP," jelasnya.

Sementara itu pengacara dari para korban di Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama Mylanie Lubis mengatakan, terdapat perbedaan nilai aset yang disita dalam kasus tersebut. "Pada waktu pertama kali dirilis kan dibilang penyitaan itu sekitar Rp 1,4 triliun, tetapi kemarin di RDP (Rapat Dengar Pendapat DPR RI) itu hanya disebutkan cuma Rp 103 miliar. Itu sangat jauh ya bedanya," ujarnya.

Oleh sebab itu, mereka berharap KPK dapat memanggil pihak terkait, dan mengusut aliran dana ke polisi maupun jaksa yang menangani kasus tersebut. Sebelumnya, Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama pada Jumat (14/2) berharap aset terdakwa bisa segera dijual, dan hasilnya dibagi sesuai ketetapan. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian hingga Rp 680 miliar dan dengan korban mencapai 600 orang lebih. **(Ant/Has)-f**

PETUNJUK JPU BELUM DIPENUHI POLISI

Berkas Pagar Laut Tangerang Dikembalikan

JAKARTA (KR) - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Alasan pengembalian itu lantaran petunjuk JPU Jampidum agar kasus ini ditindaklanjuti ke ranah tindak pidana korupsi, belum dipenuhi oleh penyidik Dittipidum Bareskrim Polri.

"Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan, pada tanggal 14 April 2025," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/4).

Sementara itu, Direktur A Jampidum Kejagung, Nanang Ibrahim Soleh mengatakan menemukan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus pemalsuan sertifikat ini. "Karena menyangkut di situ ada suap, pemalsuan sertifikatnya juga ada, penyalahgunaan kewenangan juga ada," katanya.

Menurut Nanang, apabila mengacu pada Pasal 25 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Adapun dalam kasus pemalsuan sertifikat ini, JPU menilai bahwa terdapat perkara khusus, yakni tindak pidana korupsi sehingga harus didahulukan penanganannya.

Nanang menambahkan, dalam pengembalian berkas kali ini, JPU Jampidum meminta agar kasus pemalsuan ini ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengingat ditemukannya unsur tindak pidana korupsi. "Apalagi Kortastipidkor menyampaikan bahwa mereka sedang menangani. Apabila sudah menangani, minimal bisa dijadikan satu. Jadi, mereka tinggal koordinasi," ucapnya.

(Ant/Has)-d

KR-Antara/Oky Lukmansyah

***DAMPAK HARGA NAIK:** Perajin menunjukkan emas muda usai proses peleburan di rumah industri pengolahan peleburan limbah emas Desa Pesayangan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025). Menurut perajin limbah emas, sejak harga emas naik dua pekan terakhir permintaan emas tua seharga Rp 1.780.000 pergram dan emas muda Rp 800.000 pergram dari toko emas menurun hingga 70 persen dari sebelumnya 1 kilogram menjadi 80 gram perbulan, ini akibat stok emas melimpah sedangkan daya beli masyarakat turun.*